



RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan baik serta mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya

Mojokerto, Agustus 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



AMATI SUSILO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3. Isu – Isu Penting	19
2.4. Review terhadap RKPD Perubahan.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan OPD ini mengacu pada RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD Perubahan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD Perubahan. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Perubahan yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD Perubahan.

Renja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 ttg Penerapan KTP Berbasis No. Induk Kependudukan Secara Nasional;
 17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 18. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 ttg Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 26/2009 ttg Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis No. Induk Kependudukan Secara Nasional Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 20. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis No. Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3;
33. Peraturan Daerah Kabapaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

- Tahun 2019 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 37. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
 38. Peraturan Bupati 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap RKPD Perubahan

Berisikan Uraian mengenai:

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD Perubahan, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD Perubahan, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD Perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan.

Bab III Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab IV P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Triwulan 1, secara umum selaras dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sedangkan capaian kinerja sasaran pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 di triwulan 1 secara umum dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- c. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 pada umumnya tercapai, Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 diuraikan sebagai berikut:

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan.

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terealisasi sebesar 23,33%;

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terealisasi sebesar 20%.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, terealisasi sebesar 8,78%;

c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, terealisasi sebesar 11,87%;

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, terealisasi sebesar 8,33%;

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Persentase sarana dan prasarana yang tersedia ;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, terealisasi sebesar 0%;

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, terealisasi sebesar 0% ;

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, terealisasi sebesar 0%.

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, terealisasi sebesar 16,38%;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, terealisasi sebesar 6,32%;

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, terealisasi sebesar 18,13%;

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sebesar 10,77%;

5. Penyediaan Bahan/Material.

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, terealisasi sebesar 0%;

2.) Program Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk adalah Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk.

a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk.

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, terealisasi sebesar 11,08%;

2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terealisasi sebesar 0%.

b) Penataan Pendaftaran Penduduk

Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah jumlah penerbitan dokumen KIA.

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia, terealisasi sebesar 0%.

3.) Program Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja program Pencatatan Sipil adalah persentase kepemilikan dokumen Pencatatan sipil.

a) Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil.

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan

Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, terealisasi sebesar 11,55%.

4.) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online.

a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu.

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan, terealisasi sebesar 6,40%.

b) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi.

1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pencapaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, terealisasi sebesar 7%.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pelayanan melalui inovasi pelayanan. Guna mempercepat pelayanan dan pemotongan antrian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto merubah sistem pelayanan, antara lain :

1. Pasukan Balaputra Kita (Pelayanan khusus Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan KIA);
2. Pos Ketanmu (Pelayanan Online Sistem Kependudukan Tanpa Ketemu); dan
3. Pelaku Paradewi (Pelayanan Adminduk Khusus bagi Petugas Registrasi Desa melalui Website);

4. Duta Mantan (Dukcapil Bersama Teman Kecamatan);
5. Pansus GISA (Pasukan Khusus Gerakan Indonesia Sadar Adminduk);

Tabel E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Formulir E.81																				
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten																				
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																				
2025																				
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2025 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	2	3	4	5		6		7		12		13		14		15		16		24
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Nilai)					82,17												Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2		[PROGRAM] 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)	0,00	20.758.786.232,00	82,17	6.689.016.500	81,30	575.736.069	0,00	-	0,00	-	0,00	-	81,30	575.736.069			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Nilai IKM(Nilai)			82,00		0,00												
			Jumlah Inovasi(Inovasi)			2,00		2,00												
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)	493.994.000,00	45.000.000,00	12,00	12.000.000	3,00	2.600.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	2.600.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			5,00	6.000.000	1,00	1.400.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	1.400.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			5,00	6.000.000	0,00	1.200.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.200.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan(Laporan)	28.871.496.050,00	14.485.869.219,00	13,00	5.477.708.000	4,00	480.941.964	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	480.941.964			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			504,00	5.477.708.000	0,00	480.941.964	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	480.941.964			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)	10.007.883.530,00	4.575.144.525,00	100,00	743.009.500	49,00	56.017.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	49,00	56.017.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			5,00	502.009.500	0,00	31.746.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	31.746.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12,00	16.000.000	3,00	2.900.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	2.900.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1,00	45.000.000	0,00	7.371.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	7.371.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1,00	50.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12,00	130.000.000	3,00	14.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	14.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)	3.589.465.416,00	794.975.360,00	100,00	320.800.000	8,00	36.177.105	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	36.177.105			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)			12,00	266.800.000	3,00	31.677.105	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	31.677.105			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			36,00	54.000.000	9,00	4.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	9,00	4.500.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)	1.933.379.000,00	814.669.128,00	100,00	135.499.000	15,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	15,00	-			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			16,00	40.250.000	5,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5,00	-			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1,00	48.279.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			12,00	46.970.000	3,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	-			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepimilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)																	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2		[PROGRAM] 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk(%)	5.543.714.450,00	1.739.353.412,00	99,75	380.000.000	0,00	31.020.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	31.020.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)(Dokumen)	4.336.528.950,00	1.654.970.712,00	863.500,00	354.893.500	0,00	31.020.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	31.020.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen)			136.000,00	279.893.500	0,00	31.020.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	31.020.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)			12,00	75.000.000	3,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA(Dokumen)	518.994.000,00	84.382.700,00	170.000,00	25.106.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)			4.191,00	25.106.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)															Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2		[PROGRAM] 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir)(%)	2.183.336.600,00	981.229.762,00	98,55	223.000.000	0,00	25.747.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	25.747.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Dokumen)	2.183.336.600,00	981.229.762,00	293.000,00	223.000.000	0,00	25.747.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	25.747.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)			33.500,00	223.000.000	0,00	25.747.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	25.747.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)															Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2		[PROGRAM] 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)	3.997.553.900,00	997.861.289,00	100,00	298.000.000	10,00	19.370.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	19.370.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu(Kegiatan)	1.803.979.300,00	758.886.253,00	12,00	248.000.000	3,00	15.870.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	15.870.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)			12,00	248.000.000	3,00	15.870.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	15.870.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi(Kali)	1.540.781.600,00	238.975.036,00	1,00	50.000.000	0,00	3.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)			5,00	50.000.000	1,00	3.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	3.500.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[Target Capaian Sub Kegiatan]						7.590.016.500		651.873.069		-	-	-	-	-	8,59%	651.873.069	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Secara garis besar dari 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk Tahun 2024 seluruhnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	√	

1. SASARAN 1: Meningkatkan Kepemilikan Dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran adalah:

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KTP-el)	98,5%	99,6%	101%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KK)	98,5%	100%	102%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (KIA)	33%	72,76%	220%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran usia 0-18)	94%	99,02%	105%
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan (Akta Kematian)	99%	100%	101%
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	100%	100%
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100%	100%	100%
Hasil Capaian Kinerja			118,43%

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan indikator kinerja angka kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi kepemilikan KTP-el, Kepemilikan KK, Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta kelahiran, kepemilikan akta kematian, Kepemilikan Akta Perkawinan dan kepemilikan akta perceraian menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% Dari indikator *output* diatas, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

2.3. Isu – Isu Penting

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil secara gratis.
- Memberikan perlindungan pada hak – hak dasar penduduk melalui penguatan lembaga dalam Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.
- Pemberlakuan e-KTP untuk dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan penduduk : (misalnya : perpajakan, paspor, kepemilikan benda tetap dan berbagai urusan kepolisian).

2.4. Review terhadap RKPD Perubahan

Perbandingan antara RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.17 (A)	6.689.016.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.17 (A)	6.689.016.500		
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi	2 Inovasi				Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi	1 Inovasi			
			Nilai IKM	82				Nilai IKM	82			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	12.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen	12.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	5 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	5 Dokumen	6.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan yang tersusun	5 Laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan yang tersusun	5 Laporan	6.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5.477.708.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan	13 Laporan	5.477.708.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/Bulan	5.477.708.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/Bulan	5.477.708.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	743.009.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	743.009.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(3)	(4) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(5) 5 Paket	(6) 502.009.500	(7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(8)	(9) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(10) 5 Paket	(11) 502.009.500	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	320.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	320.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	54.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	54.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	133.499.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	133.499.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	40.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	40.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.279.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.279.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	46.970.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	46.970.000	
	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,75%	380.000.000	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen KTP-EI	99,75%	380.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El	863500 Dokumen	354.893.500	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El	863500 Dokumen	354.893.500	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	136000 Dokumen	279.893.500	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	136000 Dokumen	279.893.500	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penataan Pendaftaran Penduduk		Jumlah kepemilikan dokumen KIA	170000 Dokumen	25.106.500	Penataan Pendaftaran Penduduk		Jumlah kepemilikan dokumen KIA	17000 Dokumen	25.106.500	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4191 Dokumen	25.106.500	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4191 Dokumen	25.106.500	
	Program Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98,55%	223.000.000	Program Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	98,55%	223.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0 - 18 tahun)	293000 Dokumen	223.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0 - 18 tahun)	293000 Dokumen	223.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	33500 Dokumen	223.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	33500 Dokumen	223.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	100%	298.000.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	100%	298.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			12 Kegiatan	248.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			12 Kegiatan	248.000.000	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			12 Dokumen	248.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			12 Dokumen	248.000.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 kali	50.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 kali	50.000.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			5 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			5 Dokumen	50.000.000	
Jumlah					7.590.016.500	Jumlah					7.590.016.500

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 3 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan swasta yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat dan swasta.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto mengacu pada rancangan Awal Perubahan RKPD Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu didukung kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan tambahan pagu sebagaimana tertera pada Matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada perubahan rencana kerja 2025 berikut.

**MATRIK PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KODE OPD								
NAMA OPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	B/L	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	KET
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP; Nilai Reformasi Birokrasi; Nilai IKM		6.689.016.500	7.388.496.875	699.480.375	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		12.000.000	12.000.000	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	L	6.000.000	6.000.000	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun	L	6.000.000	6.000.000	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dilaporkan		5.477.708.000	5.477.708.000	-	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	L	5.477.708.000	5.477.708.000	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		743.009.500	1.442.489.875	699.480.375	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	L	502.009.500	1.201.489.875	699.480.375	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	L	16.000.000	16.000.000	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	L	45.000.000	45.000.000	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	L	50.000.000	50.000.000	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	L	130.000.000	130.000.000	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan		320.800.000	320.800.000	-	

			administrasi perkantoran					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	L	266.800.000	266.800.000	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	L	54.000.000	54.000.000	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia		135.499.000	592.325.604	456.826.604	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas dan pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar	L	40.250.000	40.250.000	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	L	48.279.000	505.105.604	456.826.604	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	L	46.970.000	46.970.000	-	
2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk		380.000.000	380.000.000	-	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		354.893.500	354.893.500	-	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	L	279.893.500	279.893.500	-	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	L	75.000.000	75.000.000	-	
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen KIA		25.106.500	25.106.500	-	

		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko KIA	L	25.106.500	25.106.500	-	
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		223.000.000	223.000.000	-	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil		223.000.000	223.000.000	-	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil, Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	L	223.000.000	223.000.000	-	
4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		298.000.000	298.000.000	-	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu		248.000.000	248.000.000	-	

		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	L	248.000.000	248.000.000	-	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi		50.000.000	50.000.000	-	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	L	50.000.000	50.000.000	-	
TOTAL					7.590.016.500	8.289.496.875	699.480.375	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



AMAT SUSILO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199402 1 001